

KUMPULAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 21 Januari 2011

Subyek : Tambang

Hal : 21

PENAMBANGAN

Potensi Pendapatan Lenyap Rp 35,85 Miliar

BATAM, KOMPAS - Potensi pendapatan negara lenyap Rp 35,85 miliar dari penambangan pasir darat liar di Batam, Kepulauan Riau, yang dilakukan selama bertahun-tahun. Jika ditambah biaya pemulihan lahan rusak yang ditimbulkan, total kerugian akibat penambangan liar mencapai Rp 55,77 miliar.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam Dendi N Purnomo mengemukakan itu di Batam, Kamis (20/1). Ia menyatakan, pendapatan negara tersebut meliputi retribusi galian golongan C untuk pemerintah daerah dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam, masing-masing Rp 996 juta dan Rp 34,86 miliar.

Sementara biaya pemulihan lahan yang rusak diperkirakan Rp 19,92 miliar. Perhitungan biaya itu mengandaikan jika pemulihan lahan dilakukan dengan cara menguruk kembali lubang yang ditinggalkan kegiatan penambangan dengan tanah.

Penambangan pasir darat di Pulau Batam semuanya liar. Pemerintah Kota Batam tidak pernah mengeluarkan izin penambangan.

Berdasarkan data Bapedal Batam, penambangan tersebar di 73 lokasi dengan luas 83 hektar. Volume penambangan rata-rata 800 meter kubik per hari. Pasir ditambang dengan cara disedot menggunakan pompa apung.

Lokasi penambangan tak sedikit di antaranya yang berupa hutan. Kini, bentang alam itu berubah menjadi barisan danau dengan kedalaman bervariasi, antara 3 meter dan 12 meter.

Penertiban dilakukan beberapa kali, tetapi terkendala keterlibatan sejumlah aparat. Penertiban baru efektif dilakukan mulai Juni 2010. Bapedal telah memeriksa 22 saksi, sementara tersangka belum ditetapkan.

Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Manusia Batam Amiruddin mengatakan, kebutuhan pasir di kotanya rata-rata 2.000 meter kubik per hari. Sekitar 800 meter kubik di antaranya dipenuhi penambangan liar di Batam. Sisanya dari Karimun dan Bintan. (las)